

## ABSTRACT

One of the major focus areas of financial reform in Indonesia is to achieve transparent management of public finances. Therefore, transparency of financial management is believed to create public accountability and prevent fraudulent acts of government, thereby leading to an increase in public confidence in the government. In the context of the company, Beekes and Brown (2006) show that corporate governance makes companies more informative (more transparent). Therefore, the purpose of this research is to develop research Beekes and Brown (2006) in the context of the government to examine the effect of local government governance to transparency of local financial management. The theory used to achieve these objectives is agency theory. This research was conducted in 32 local governments (provincial government) in Indonesia.

Based on a simple regression model, it is evident that the local government governance and significant positive effect on the transparency of local financial management. The findings of this study are consistent with research conducted by Beekes and Brown (2006), Arman et al. (2012), Beekes et al. (2014; 2016a; 2016b) in the context of corporate governance. They found that the quality of governance to make disclosures more informative (more transparent). Thus, it can be said that the same result, which is found in the corporate environment are also found in environmental governance in Indonesia. In addition, this study also showed that the index of transparency of local financial management (provincial government) in Indonesia is still not transparent based on the level of transparency Adiloglu and Vuran (2012) and not enough (insufficient) budget transparency ranked by IBP (2015).

The findings of this study provide a useful contribution to the central public authorities (executive and legislative) in demonstrating the important role of local government governance in encouraging the transparency of local financial management. Information about this study can be used as new evidence for policy makers and regulators of the central government in formulating, preparing and implementing rules, effective policies related to efforts to improve the transparency of local financial management in the future. Furthermore, for academics, the findings of this study can be used as the basis for research related to the topic of local government governance and transparency of local financial management.

**Keywords: Transparency of Local Financial Management, Local Government Governance (Provincial Government)**

## INTISARI

Salah satu sorotan utama reformasi keuangan daerah di Indonesia adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang transparan. Sebab, transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat menciptakan akuntabilitas publik dan mencegah tindakan curang pemerintah, sehingga mengarah pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam konteks perusahaan, Beekes dan Brown (2006) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan menjadikan perusahaan lebih informatif (lebih transparan). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan penelitian Beekes dan Brown (2006) ke dalam konteks pemerintah dengan menguji pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Teori yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah teori agensi. Penelitian ini dilakukan pada 32 pemerintah daerah (pemerintah provinsi) di Indonesia.

Berdasarkan model regresi sederhana, terbukti bahwa tata kelola pemerintah daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut menguatkan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah (pemerintah provinsi) di Indonesia masih tergolong tidak transparan berdasarkan tingkat transparansi Adiloglu dan Vuran (2012) dan tidak cukup (*insufficient*) berdasarkan peringkat keterbukaan anggaran IBP (2015).

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pejabat publik pusat (eksekutif dan legislatif) dalam menunjukkan peran penting tata kelola pemerintah daerah dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah. Informasi penelitian ini dapat dijadikan bukti baru bagi para pembuat kebijakan dan regulator pemerintah pusat dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan peraturan dan kebijakan yang efektif terkait dengan upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Selanjutnya bagi akademisi, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian yang terkait dengan topik tata kelola pemerintah daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi)**